

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Penyerapan Rendah, Anggaran Minta Ditambah
Entitas / Cakupan	: Kabupaten Bekasi
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat / Hal.5
Edisi	: Selasa, 18 September 2018

Penyerapan Rendah, Anggaran Minta Ditambah

CIKARANG, (PR).-

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi mengajukan penambahan anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan 2018 menjadi Rp 140 miliar. Jumlah ini meningkat Rp 100 miliar dari pengajuan awal yakni Rp 40 miliar.

Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Iman Nugraha mengatakan, pehabisan ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan berbagai fasilitas demi mendukung Kabupaten Bekasi sebagai wilayah layak anak.

"Sesuai dengan instruksi bupati, kami saat ini lagi fokus mendukung program Kota Layak Anak demi mewujudkan Kabupaten Bekasi ramah anak. Usulan kami di ABT (anggaran biaya tambahan) awalnya Rp 40 miliar, lalu kami sudah usul tambahan lagi Rp 100 miliar, semoga nanti disetujui dewan," ujar Iman, Senin (17/9/2018).

Usulan terbesar untuk APBD Perubahan tahun ini, kata dia, berasal dari bidang bangunan gedung negara yakni pembangunan toilet sekolah sebagai pendukung program Kota Layak Anak dari pemerintah pusat.

"Komitmen Pemkab Bekasi jelas untuk program ini, kami gerak cepat begitu ditetapkan menjadi daerah layak anak. Selain instruksi dari pimpinan, kota layak anak ini memang bagian dari program pemerintah pusat. Rencananya untuk satu titik lokasi sekolah akan dilengkapi empat sampai enam ruang toilet dengan anggaran sebesar Rp 150 juta hingga Rp 200 juta per titiknya," katanya.

Selain pembangunan gedung negara, penambahan anggaran pun dialokasikan untuk masing-masing bidang seperti bidang pemeliharaan serta pengelolaan jalan dan jembatan. "Di bidang ini kami usulkan kurang lebih Rp 50 miliar untuk peningkatan dan pemeliharaan jalan seperti di ruas jalan Kandanggereng dan Tegal Danas, Kecamatan Cikarang Pusat," katanya.

Selanjutnya, anggaran dilokasikan untuk bidang pengelolaan sumber daya air (PSDA) sebesar Rp 25 miliar. Anggaran tersebut disiapkan untuk berbagai kegiatan pencegahan banjir seperti normalisasi sungai, pembuatan turap, drainase, perbaikan bendungan, serta pemasangan *lining* saluran irigasi.

"Rencananya, pencegahan banjir akan dilakukan di beberapa kali seperti Kali Kalen Rowak, Kali Mati, Kali Busa, Kali Srengseng. Total ada 10 kali. Sementara untuk Kali Bekasi, Ciharang, Cikarang-Bekasi-Laut, dan Kali Citarum itu kewenangannya ada di pusat serta provinsi," ujarnya.

Iman berharap usulan yang saat ini tengah dalam proses pembahasan bersama DPRD Kabupaten Bekasi dapat diakomodasi. Selanjutnya, usulan dapat disahkan melalui rapat paripurna pengesahan APBD Perubahan Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2018.

Penyerapan rendah

Sementara itu, diakui Iman, penyerapan anggaran pada APBD 2018 di Dinas PUPR Kabupaten Bekasi terbilang rendah. Hingga kini, penyerapan anggaran kurang dari 20 persen. Hal tersebut, kata dia, disebabkan berbagai proyek infrastruktur masih dalam pengerjaan.

"Kalau dipersentasekan masih sekitar 14 persen penyerapan anggaran. Tapi itu karena memang belum dilakukan pembayaran terhadap berbagai proyek, karena pengerjaan masih dilakukan," katanya.

Meskipun penyerapan rendah, berbeda dengan tahun lalu, saat ini 80 persen proyek infrastruktur telah dikerjakan. "Kalau yang dikerjakan, dari sekian banyak pembangunan infrastruktur, 80 persennya sudah dikerjakan. Tinggal kami melakukan pemantauan agar pembangunan berjalan tepat waktu dengan kualitas yang baik," ujarnya.

Seperti diketahui, Dinas PUPR menjadi instansi dengan kucuran anggaran terbesar di Kabupaten Bekasi. Dalam satu tahun anggaran, instansi yang mengerjakan seluruh proyek infrastruktur ini dapat memperoleh anggaran hingga Rp 1 triliun.

Sayangnya, tingginya anggaran tersebut tidak disertai dengan penyerapan maksimal akibat berbagai persoalan seperti gagal lelang hingga kepala dinas yang mengundurkan diri. Akibatnya, banyak anggaran yang menjadi silpa karena tidak digunakan.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Sunandar menyatakan bakal membahas lebih dalam terkait penambahan anggaran di Dinas PUPR. **(Tommi Andryandy)*****